

Judul : DPR Tunda Bacakan Surat Jokowi Soal Tito
Tanggal : Jumat, 17 Juni 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1-9

DPR Tunda Bacakan Surat Jokowi Soal Tito

● EKO SUPRIYADI, AGUS RAHARJO

JAKARTA — DPR menunda rapat paripurna terkait pencalonan Komijen Tito Karnavian sebagai kapolri. Seharusnya, rapat digelar pada Kamis (16/6), tapi akhirnya pimpinan DPR memutuskan menjadwalkan ulang menjadi Senin (20/6). Sementara itu, uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri dilakukan pada Rabu (23/6).

Rencana semula, mestinya dalam rapat paripurna disampaikan bahwa

DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pencalonan Tito. "Pembacaan surat Presiden soal pengajuan calon kapolri dilakukan Senin (20/6)," kata Ketua DPR Ade Komarudin, kemarin.

Setelah pembacaan surat dari Presiden, rapat paripurna akan melimpahkan nama calon kapolri untuk selanjutnya diproses oleh Komisi III DPR. Langkah berikutnya, Komisi III



Senioritas Dinilai
tak Jadi Soal

Hlm-9

mengagendakan kunjungan ke rumah Tito.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, soal uji kelayakan dan kepatutan menjadi hak Komisi III. Kalau memang mengikuti prosedur, kata Ade, paling cepat uji kelayakan dan kepatutan dilakukan pekan depan setelah kunjungan ke rumah Tito.

Ade mengaku, setelah menerima nama calon kapolri yang diantarkan

langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, sehari sebelumnya, ia langsung menghubungi Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Pembicaraan mengenai uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya minta lebih cepat lebih bagus. Memang, kalau pekan ini agak repot, tapi lebih cepat lebih bagus," ujar Ade.

Ketua Komisi III DPR Bambang

Bersambung ke hlm 9 kol 1-3

DPR Tunda Bacakan Surat Jokowi Soal Tito dari hlm 1

Soesatyo mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri akan dilakukan pada Rabu (22/6). Ini melalui beberapa tahap. Pertama, pengumuman di media massa, lalu dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah calon kapolri.

Berikutnya, Komisi III membutuhkan masukan dari masyarakat melalui rapat dengar pendapat. Setelah itu, baru dilaksanakan penyampaian visi dan misi dari calon kapolri sendiri disertai uji kelayakan dan kepatutan.

"Kita akan melaksanakan mulai pekan depan agar tanggal 28 Juni sudah bisa disahkan di sidang paripurna sebelum libur panjang Idul Fitri," ujar Bambang. Ia menjelaskan, setelah uji kelayakan, digelar rapat pleno untuk memutuskan menolak atau menerima calon kapolri.

Setelah itu, baru dilaksanakan rapat paripurna untuk disahkan sebagai sikap resmi DPR, kemudian diberikan pada Presiden Jokowi.

Terkait penunjukan dirinya sebagai calon tunggal kapolri, Tito menegaskan, komunikasinya dengan para seniorinya berjalan baik. Ia mencontohkan hubungan baiknya dengan Budi Gunawan, Budi Waseso, ataupun senior lainnya.

Dari komunikasi dengan

mereka, Tito menyimpulkan para senior itu mendukung pencalonannya sebagai kapolri menggantikan Badrodin Haiti. "Prinsipnya senior mendukung, tapi saya harus tunjukkan *leadership* yang dapat diterima, yaitu komitmen memperbaiki Polri."

Meski dia termasuk angkatan muda di internal Polri, jelas Tito, soal senioritas dalam suksesti pergantian kapolri tidak akan menimbulkan gejolak. Ia beralasan, Polri merupakan organisasi dengan asas komando tunggal, yaitu di tingkat pimpinan.

Pimpinan Polri juga harus bisa menunjukkan karakter kepemimpinan yang mampu diapresiasi organisasi dan prajurit yang dipimpinnya. "Tidak menjamin, sosok senior pasti dapat loyalitas dari bawahan," katanya.

Tito juga berjanji kelak mengedepankan kompetensi, bukan senioritas. Karena itu, belum tentu yang senior mendapatkan tempat di bawah kepemimpinannya. Sosok yang kompeten dan memiliki visi reformasi yang bisa menduduki posisi di internal Polri.

Mereka yang akan menjadi prioritas pilihan Tito. "Bagi saya, tugas utama saya adalah reformasi polisi," tutur Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/6). Reformasi yang ia

harapkan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dari Polri untuk masyarakat.

Ia juga melihat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dan bila kelak menjadi kapolri, ia akan membangun kembali kepercayaan itu. Ia berencana mengutamakan syarat *interpersonal skill*, artinya lebih dipilih sosok yang memiliki kompetensi dan visi reformasi.

Presiden Joko Widodo berharap DPR dapat segera memproses surat permohonan persetujuan calon kapolri yang diajukannya. "Kemarin, 15 Juni 2016, saya telah menyerahkan, menyampaikan surat permohonan persetujuan calon kapolri ke DPR," katanya, Kamis.

Menurut dia, jenderal bintang tiga itu tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memimpin Polri. Buktinya, Tito pernah meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik Akademi Kepolisian di angkatannya. "Semua sudah tahu, beliau kan dapat Adhi Makayasa."

Dengan kemampuannya tersebut, Presiden percaya Tito dapat meningkatkan profesionalisme Polri sekaligus memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Ia juga menyerahkan regenerasi pada kapolri yang baru. ■ halimatus sa'diyah/qommarria rostanti/antara ed: ferry kisihandi